

BAB II

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN SRI SULTAN HB IX

A. Latar Belakang Keluarga

Sri Sultan HB IX terlahir di kalangan Keraton Kasultanan Yogyakarta.¹

Kasultanan Yogyakarta merupakan suatu wilayah kerajaan pecahan dari Mataram Islam yang berdiri setelah adanya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut menyepakati pembagian kekuasaan Mataram menjadi dua bagian, Sri Susuhunan Paku Buwono III berkuasa di Surakarta dan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I berkuasa di Yogyakarta.

Sekitar tahun 1745, terjadilah pemberontakan di Kerajaan Mataram yang dilakukan oleh Mas Said dan Martopuro. Paku Buwono II menjanjikan akan memberikan daerah Sukawati (wilayah Sragen sekarang) bagi yang mampu menumpas pemberontakan tersebut. Kemudian Pangeran Mangkubumi bersedia memadamkan pemberontakan itu. Pangeran Mangkubumi adalah putera Prabu Amangkurat IV dengan permaisuri yang kedua (Ratu Tejawati), sedangkan penguasa Mataram waktu itu adalah putera Amangkurat IV dari permaisuri yang pertama (Ratu Kencana) yang setelah naik tahta bergelar Paku Buwono II.

Setelah Pangeran Mangkubumi menjalankan tugasnya, ternyata Paku Buwono II mengingkari janjinya. Dengan adanya hal ini menyebabkan Pangeran Mangkubumi bersama Mas Said berbalik melawan Paku Buwono II. Perselisihan

¹ Keraton berasal dari kata *Keratuan* atau *Kedatuan*, dimana *Ratu* dan *Datu* artinya Raja. Jadi Keraton mempunyai makna tempat raja atau tempatnya ratu. Wawancara dengan K.R.T. Jatiningrat, SH, 22 Desember 2010.

ini berlangsung bertahun-tahun hingga Paku Buwono II wafat karena sakit keras. Sebelum wafat, sang raja telah mengadakan perjanjian dengan VOC bahwa Kerajaan Mataram dititipkan kepada VOC untuk mengatur warisan kepada anak keturunan Raja agar tidak terjadi perselisihan. Dengan adanya hal ini seolah kekuasaan Mataram kini berada di tangan VOC, meski Putera Mahkota telah dinobatkan sebagai raja dengan gelar Paku Buwono III.

Pada tahun 1755 pihak VOC menyadari betapa sukaranya mematahkan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said serta betapa banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk memerangi pemberontakan tersebut. Kemudian VOC mendekati Pangeran Mangkubumi untuk mengadakan perundingan perdamaian tanpa Mas Said. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah Perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Giyanti (Februari 1755), yang isinya antara lain, bahwa Pangeran Mangkubumi akan diberi sebagian daerah Mataram dan bahwa bangsawan tersebut diakui sebagai raja di Yogyakarta dengan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I.²

Satu bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tepatnya hari Kamis *Pon* tanggal 29 *Jumadilawal* 1680 atau 13 Maret 1755, Sultan Hamengku Buwana I memproklamirkan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ibukota Ngayogyakarta dan memiliki separuh dari wilayah Kerajaan Mataram. Proklamasi ini terjadi di Pesanggrahan Ambarketawang dan dikenal dengan peristiwa *Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram* –

² Bambang Suwondo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1976/1977, hlm. 107.

Ngayogyakarta. Pada hari Kamis *Pon* tanggal 3 *Sura* 1681 atau bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 1755, Sri Sultan Hamengku Buwana I memerintahkan untuk membangun Keraton Ngayogyakarta di Desa Pacethokan dalam Hutan Beringan yang pada awalnya bernama Garjitarwati.

Pembangunan ibu kota Kasultanan Yogyakarta ini membutuhkan waktu satu tahun. Pada hari Kamis *Pahing* tanggal 13 *Sura* 1682 bertepatan dengan 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengku Buwana I beserta keluarganya pindah atau *boyongan* dari Pesanggrahan Ambarketawang masuk ke dalam Keraton Ngayogyakarta. Peristiwa perpindahan ini ditandai dengan *candra sengkala memet Dwi Naga Rasa Tunggal* berupa dua ekor naga yang kedua ekornya saling melilit dan diukirkan di atas kelir Regol Kemagangan dan Regol Gadhung Mlathi yang terdapat di dalam Keraton.

Momentum kepindahan inilah yang dipakai sebagai dasar penentuan Hari Jadi Kota Yogyakarta karena mulai saat itu berbagai macam sarana dan bangunan pendukung untuk mewadahi aktivitas pemerintahan baik kegiatan sosial, politik, ekonomi, budaya maupun tempat tinggal mulai dibangun secara bertahap. Berdasarkan itu semua maka Hari Jadi Kota Yogyakarta ditentukan pada tanggal 7 Oktober 1756.³

Wilayah Kasultanan memanjang di Pulau Jawa bagian selatan dan berbatasan di sebelah selatan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur (distrik

³ Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Yogyakarta. *Sejarah Berdirinya Kota Yogyakarta*. Tersedia pada <http://pariwisata.jogja.go.id>. Diakses pada tanggal 13 November 2010.

Ngantang) dengan Karesidenan Pasuruan (VOC), di sebelah barat (suatu *enclave*) dengan Karesidenan Tegal dan Kabupaten-kabupaten Purwokerto dan Purbalingga (Kasunanan), di sebelah utara dengan Karesidenan-karesidenan Tegal, Pekalongan, Semarang, Rembang, Gresik, Surabaya dan Pasuruan (VOC).⁴ Di dalam perbatasan-perbatasan wilayah ini sering terjadi konflik karena batas-batas kabur atau tidak jelas. Hal inilah yang mengakibatkan Kasultanan selalu berseteru dengan Kasunanan maupun VOC selain karena faktor historis.

Kerajaan Mataram merupakan suatu kerajaan yang sangat kuat kekuasaanya atas Pulau Jawa sebelum mengalami perpecahan dalam Persetujuan Giyanti. Sebagai contoh adalah pada masa Sultan Agung. Wawasan politik Sultan Agung sangat luas dan jauh ke depan. Perekonomian pun maju pesat baik dari sektor agraris maupun maritim. Kejayaan Mataram dalam sektor maritim terbukti dari upaya serangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia melalui Pantai Utara Jawa. Sultan Agung menyerang VOC di Batavia hingga dua kali, yaitu tahun 1628 dan 1629.⁵ Sultan Agung menjadi sosok yang diagungkan oleh raja-raja penerus dinasti Mataram, diantaranya adalah Sri Sultan HB IX yang bertahta di Kasultanan Yogyakarta.

Kejayaan Mataram yang diusahakan oleh Sultan Agung kini telah lenyap. Mataram terpecah menjadi dua bagian yang kemudian pada saatnya nanti juga

⁴ Pranoedjoe Poespaningrat, *Kisah Para Leluhur dan yang Diluhurkan dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru*. Jakarta : PB. Kedaulatan Rakyat, hlm. 106.

⁵ M.C. Ricklefs, “A History of Modern Indonesia”, a.b. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 67.

terpecah lagi menjadi empat bagian (Paku Alaman dan Mangkunegaraan). Terpecahnya kerajaan besar ini tentunya akibat hausnya penguasa akan kekuasaan serta adanya politik bangsa Belanda (VOC) untuk menguasai Mataram. Dengan strategi *devide et impera* atau dengan kata lain memecah belah serta mengadu domba, membuat VOC mudah mencapai tujuannya. Pengalaman pahit ini kelak akan benar-benar diresapi oleh raja Kasultanan Yogyakarta yang memerintah pada masa-masa revolusi bangsa Indonesia, yakni Sri Sultan HB IX (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan Sri Sultan).

Sebelum menduduki tahta Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan semasa kecil bernama Gusti Raden Mas (GRM) Dorodjatun. Ayahnya bernama Pangeran Purubaya, yang kemudian dinobatkan menjadi Sri Sultan HB VIII. Dorodjatun lahir dari seorang ibu yang bernama R.A. Kustilah, dimana setelah suaminya diangkat menjadi raja, ia kemudian bergelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom.

Dorodjatun lahir pada tanggal 12 April 1912 atau menurut hitungan Jawa jatuh pada tanggal 25 *Rabingulakir* tahun 1842. Dialah yang pada gilirannya nanti diangkat menjadi Pangeran Adipati Anom⁶ dan dinobatkan menjadi *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingala Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah IX*.⁷ Arti gelar tersebut ialah bahwa Sultanlah penguasa yang sah di dunia ini, dia juga *Senopati Ingala* yang

⁶ Ini merupakan gelar setelah dinobatkan menjadi Putra Mahkota. Biasanya yang menjadi Putra Mahkota dapat dipastikan kelak akan menjadi pewaris tahta atau raja.

⁷ Kustiniyati Mochtar, “Pak Sultan dari Masa ke Masa”, dalam Atmokusumah (Peny), *Tahta Untuk Rakyat Celaht-celaht Kehidupan Sultan HB IX*, Jakarta : PT. Gramedia, 1982, hlm. 21.

berarti mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan dan bahwa dia pulalah panglima tertinggi angkatan perang pada saat terjadi peperangan. Sultan juga *Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama* atau penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai *Kalifatullah*, pengganti Muhammad Rasul Allah.⁸

Kehidupan di Kasultanan pada masa itu sebenarnya secara langsung dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Setiap raja atau sultan yang akan naik tahta selalu terlebih dahulu membuat kesepakatan atau kontrak politik dengan pemerintah kolonial. Pada dasarnya kontrak politik tersebut dibuat untuk membatasi kekuasaan setiap sultan yang bertahta. Pemerintah Kolonial Belanda memang licik dalam hal penguasaan tanah jajahan. Setiap sultan yang membangkang maka akan dicap sebagai pemberontak dan akan diasingkan ke wilayah lain, seperti yang pernah dialami oleh Sri Sultan HB II yang pernah dibuang ke Ambon karena dianggap tidak kooperatif terhadap penguasa kolonial.

Dengan kekuatan militer yang tidak sebanding dengan militer Hindia Belanda, tentu setiap sultan atau raja yang bekuasa hanya bisa pasrah dan mengikuti kemauan Hindia Belanda. Khusus untuk wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Surakarta, diterapkan sistem pemerintahan tidak langsung oleh Pemerintah Kolonial. Dalam hal ini berarti rakyat yang berada di wilayah tersebut masih bisa merasakan kepemimpinan rajanya sendiri. Meskipun demikian pihak Hindia Belanda tetap memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam keraton, yakni melalui *Pepatih Dalem*, sebuah jabatan yang mempunyai tanggung jawab kepada

⁸ Sri Sultan HB IX Sang Bangsawan yang Demokratis. (2010). Tersedia pada <http://www.tokohindonesia.com>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2010.

dua “majikan”, kepada Sultan dan Gubernur Jenderal Belanda yang diwakili oleh seorang Residen.

B. Pendidikan

Sejak berumur empat tahun Dorodjatun harus berpisah dari kedua orang tuanya. Hal ini atas kehendak ayahandanya sendiri yang bermaksud mendidik anak-anaknya dengan penekanan kemandirian dan kesederhanaan. Dorodjatun memulai pendidikannya di sekolah *Frobel* (taman kanak-kanak), milik Juffrouw Willer di Bintaran Kidul. Mulai saat itu juga Dorodjatun dipondokkan pada keluarga Mulder, seorang kepala sekolah pada NHJJS (*Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*). Sejak saat itu Dorodjatun sering dipanggil dengan sebutan Henkie (Henk yang kecil).⁹ Selanjutnya nama ini dipakai pada waktu sekolah dan ketika kuliah di perguruan tinggi bahkan setelah selesai kuliah khususnya bagi teman-teman dekatnya.¹⁰ Tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada Dorodjatun meski ia adalah putra dari calon Sultan HB VIII (pada waktu itu Pangeran Purubaya belum naik tahta).

Menginjak usia enam tahun, Dorodjatun menempuh pendidikan di *Eerste Europese Lagere School B* (Een B) di Kampementstraat atau Jalan Panembahan Senopati sekarang. Masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan istilah *Sekolah Kidul Ngloji*, dimana sekolah ini merupakan sekolah dasar terbaik pada waktu itu.

⁹ Sebutan “Henkie” diberikan oleh keluarga Mulder, diambil dari sebuah nama suami Ratu Wilhelmina, yakni Pangeran Hendrik. Sejak saat itu pula Dorodjatun biasa dipanggil dengan sapaan Hengkie. Lihat Kustiniyati Mochtar, *op.cit.*, hlm. 26.

¹⁰ Ahmad Adaby Darban, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta : Depdikbud, 1998, hlm. 12.

Di sekolah ini tampak sekali diskriminasi antara anak-anak pribumi dengan anak-anak asing, khususnya Belanda. Setelah beberapa tahun duduk di *Een B* ia pindah ke *Neutrale Europese Lagere School* di Pakemweg (Jalan Kaliurang). Sementara itu tempat *kost* Dorodjatun pun pindah ke rumah keluarga Cock.

Ayahanda Dorodjatun yang semula masih putra mahkota telah dinobatkan menjadi Sultan HB VIII pada tahun 1921. Meskipun demikian, kehidupan Dorodjatun tidak berubah menjadi istimewa meski ia merupakan putera seorang raja. Ia tetap harus hidup *kost* dan menempuh pendidikannya. Banyak pihak yang menganggap Sultan HB VIII kejam terhadap putera-puteranya. Seorang keturunan raja yang semestinya mendapat pelayanan yang baik di Keraton justru harus hidup selayaknya orang-orang kebanyakan.

Selesai menempuh pendidikan dasarnya, Dorodjatun kemudian melanjutkan pendidikannya di *Hogere Burger Schcool* (HBS) Semarang. Ia kemudian dipondokkan pada keluarga Voskuil, dengan kepala keluarga yang bekerja sebagai kepala penjara Mlaten. Dikarenakan iklim yang terlalu panas dan tidak memungkinkan bagi kesehatan Dorodjatun, maka ayahnya memutuskan untuk memindahkannya ke Bandung pada 28 September 1927.

Selanjutnya Dorodjatun dikirim ke Bandung dan dititipkan pada keluarga De Boer dan sekolah di *Hogere Burger Schcool* (HBS) Bandung. Setelah menyelesaikan studinya di HBS, ayahnya memerintahkan agar melanjutkan studinya di Belanda. Sultan HB VIII memang telah berfikir jauh ke depan dan memahami akan tanda-tanda perubahan zaman. Putera-puteranya sengaja dikirim untuk belajar kepada orang-orang Belanda, dengan maksud agar mereka

memahami pemikiran penjajah yang kelak akan dihadapi. Sikap Sultan HB VIII ini berbeda dengan Sultan HB VII yang justru memberikan pendidikan kepada putera-puteranya di dalam Keraton dengan mendatangkan para Kyai dan sebagainya.¹¹

Pada Maret 1930 Dorodjatun bersama kakaknya yang bernama B.R.M. Tinggarto (kelak bernama G.B.P.H. Prabuningrat) dan ditemani keluarga Hofland seorang *administrateur* pabrik gula Gesikan di Yogyakarta menuju Belanda. Di Belanda ia memasuki sekolah *Gymnasium* di Haarlem. Ia bertempat tinggal pada keluarga Ir. W.C.G.H Van Mourik Broekmen seorang Direktur sekolah itu. Di sekolah ini Dorodjatun menamatkan pendidikannya tahun 1934.

Setelah menamatkan pendidikannya untuk tingkat Sekolah Menengah Atas, Dorodjatun melanjutkan kuliah di Kota Leiden.¹² Dorodjatun mengambil jurusan Indologi yaitu jurusan gabungan dari bidang ekonomi dan hukum. Memang jurusan inilah yang diinginkan oleh Dorodjatun, terlebih matakuliah Tata Negara, Dorodjatun sangat menyukainya. Selama menjadi mahasiswa di Leiden, ia aktif mengikuti diskusi yang dipimpin oleh Prof. Schrieke.¹³ Keadaan yang demikian

¹¹ Wawancara dengan KRT. H. Jatiningsrat, SH, 22 Desember 2010.

¹² Sebelum Sultan HB VIII mengirim putera-puteranya ke negeri Belanda, terlebih dahulu beliau berpesan agar supaya mereka tidak terpikat oleh *noni- noni* Belanda, hal ini akan mempengaruhi jiwa mereka yang sejatinya dipersiapkan untuk menghadapi para penjajah. (Wawancara dengan GBPH. H. Joyokusumo, Rabu 12 Januari 2010. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh KRT. H. Jatiningsrat, S.H)

¹³ Prof. Schrieke adalah seorang doktor Sastra Timur yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang pemerintahan di Indonesia. Lihat P. J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta : Kanisius, 1994, hlm. 146.

membuat kehidupan sebagai mahasiswa memiliki pengalaman yang dapat memperluas cakrawala berfikirnya. Keaktifannya dalam menempuh studi dan mengikuti diskusi-diskusi mengantarkan Dorodjatun meraih gelar *Candidaats-examen* tahun 1937 dan melanjutkan studinya pada tingkat doktoral.

Ketika menempuh tingkat doktoral, Dorodjatun harus pulang memenuhi panggilan ayahanda yang sudah mulai menurun kesehatannya akibat diabetes berat pada tahun 1939.¹⁴ Meski pendidikan Dorodjatun belum tuntas, namun sudah cukup untuk bekal kelak ketika berjuang melawan Belanda pada masa-masa revolusi di Indonesia. Meski menempuh pendidikan di Eropa, hal ini tidak membuat dirinya bersikap pro kepada Belanda, bahkan kelak pengabdian kepada bangsa Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan akan sangat terasa kental. Berbeda dengan yang kebanyakan orang khawatirkan, bahwa pendidikan yang kebarat-baratan akan menimbulkan sikap pro kolonialisme.

Dengan latar belakang pendidikan tersebut maka Sri Sultan adalah seorang raja yang berpendidikan maju dan tinggi. Dengan pendidikan itu Sri Sultan memiliki pengetahuan tentang ketatanegaraan Indonesia modern dan tradisional dan menurut dia pendidikan modern itu sudah mempengaruhi jiwanya menjadi modern tetapi tidak meninggalkan yang tradisional. Sri Sultan merasa pengaruh yang mendorong dalam gerak langkahnya dalam mengadakan perubahan adalah :

1. Rasa *minderwaardigheidcomplex* terhadap kelompok cendekiawan dan politik yang mengira bahwa semua raja itu antek Belanda

¹⁴ Pranoedjoe Poespaningrat, *op.cit.*, 193.

2. Teladan nenek moyangnya yang dengan gigih mengadakan perlawanan terhadap penjajah terutama Sultan Agung, Sri Sultan HB I, Sri Sultan HB II, dan Pangeran Diponegoro
3. Sikap keluarga Belanda terhadap pembantu rumah tangga yang bersuku Jawa telah menimbulkan solidaritasnya terhadap rakyat kecil dan tertindas.

Hal ini menumbuhkan semangat nasionalisme dan tekad yang kuat untuk merdeka di dalam lingkungan negara Indonesia merdeka yang juga diperjuangkan oleh kelompok cendekiawan dan politik.¹⁵

C. Penobatan Sebagai Sultan

Sejak Sultan HB VIII wafat, kekuasaan Keraton Yogyakarta diambil alih oleh Gubernur Lucian Adam agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Selanjutnya Gubernur L. Adam membentuk panitia yang memiliki 5 anggota yang diketuai Dorodjatun. Pada saat itu Dorodjatun berusia 27 tahun yaitu usia paling muda diantara paman dan saudara-saudaranya dan ia belum memiliki gelar pangeran sebagaimana lainnya. Kelima anggota tersebut adalah G.R.M. Dorodjatun yang menjabat sebagai ketua, sedangkan anggotanya terdiri dari G.P.H. Mangkukusumo, G.P.H. Tejokusumo, Puruboyo serta Pangeran Hangabehi. Dorodjatun dipilih sebagai ketua karena sesuai dengan keinginan Sultan HB VIII agar Dorodjatun menggantikan kedudukannya sebagai Sultan. Namun demikian urusan suksesi kepemimpinan tergantung pada pemerintah

¹⁵ P.J. Suwarno, *Pengaruh Keraton Yogyakarta Terhadap Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta : FPIPS Sanata Dharma, 1993, hlm. 10.

Hindia Belanda yang selalu ditandai dengan adanya penandatanganan kontrak politik.

Kontrak politik yang diajukan oleh pihak Belanda, benar-benar membuat G.R.M. Dorodjatun dan Gubernur L. Adam terlibat perdebatan panjang dan sangat lama. Kontrak politik memang selalu merugikan pihak Kesultanan, namun hal ini tetap saja diterima oleh para raja yang akan naik tahta, karena tekanan Belanda yang kuat dan mustahil untuk bermusuhan secara terbuka. Sebelum kontrak politik tersebut ditandatangani oleh G.R.M. Dorodjatun, terjadi perundingan yang berlarut-larut, hal ini disebabkan tiga hal, yaitu :

1. Masalah kedudukan dan peranan *Pepatih Dalem* yang memiliki dwi fungsi dan loyalitas terhadap pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan. G.R.M. Dorodjatun menghendaki diubahnya kedudukan dan peranan pegawai Kesultanan memiliki monofungsi dan loyalitas hanya kepada Sultan
2. Masalah Dewan Penasehat Kesultanan yang selama ini setengah anggotanya diusulkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan setengahnya lagi oleh Sultan, tetapi pengangkatannya harus dengan disetujui oleh pihak Belanda. Menurut G.R.M. Dorodjatun prosedur pemilihan semacam ini membatasi kebebasan suara Dewan Penasehat untuk mewakili kepentingan rakyat
3. Masalah prajurit Keraton yang diinginkan oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi satu legiun yang secara hirarkis struktural berada di bawah komando KNIL (pasukan atau tentara Hindia Belanda), kemudian Sultan tidak memiliki wewenang untuk memerintah tapi berkewajiban untuk menggaji dan

melatihnya. Tentu saja G.R.M. Dorodjatun menolak dan menginginkan prajurit Keraton dibawah komando Sultan.¹⁶

Satu minggu setelah naskah perjanjian politik ditandatangani, diadakan penobatan G.R.M. Dorodjatun menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hari bersejarah tersebut jatuh pada hari Senin Pon tanggal 8 *Sapar* tahun Jawa *Dal* 1871 bertepatan dengan tanggal 18 Maret 1940.¹⁷ Dalam prosesi penobatan ini Sri Sultan mengucapkan pidato yang sempat mengejutkan pejabat-pejabat Belanda. Pidato tersebut antara lain berbunyi :

Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada dipundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Keraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pegetahuan dan kemampuan yang ada pada saya.¹⁸

Isi pidato tersebut menunjukkan bahwa Sri Sultan tetap memegang budaya Jawa, meskipun Sri Sultan telah lama mengenyam pendidikan di negeri Belanda. Sebagai pewaris budaya, Sri Sultan tidak ingin menghapuskan kepercayaan masyarakat yang memiliki daya magis, meskipun pengertian kepercayaan itu yang telah menjadi tradisi masyarakat mengalami perubahan.

¹⁶ Ahmad Adaby Darban, *op. cit.*, hlm. 15.

¹⁷ Sutrisno Kutoyo, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX : Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1996, hlm. 95.

¹⁸ Atmakusumah, *op. cit.*, hlm. 53.

Tradisi Labuhan yang selalu diselenggarakan pada waktu upacara memperingati hari penobatan Sri Sultan masih tetap berlangsung. Tradisi Labuhan dilakukan dengan membuang sesaji untuk Nyi Roro Kidul yang menurut kepercayaan sebagai istri para Raja Jawa masih tetap berjalan, hanya saja pengertian dari tradisi Labuhan telah mengalami transformasi sejak Sri Sultan naik tahta, pengertian membuang sesaji dimaksudkan untuk memperingati naik tahtanya Sri Sultan dan mengucapkan rasa syukur atas kenikmatan dan karunia yang diberikan kepada Allah SWT.

Penobatan Sri Sultan mendatangkan harapan baru bagi seluruh masyarakat. Bahkan para cerdik pandai atau kaum intelektual di seluruh tanah air menaruh harapan pada beliau. Masyarakat sudah membaca di media massa bahwa G.R.M. Dorodjatun bersikap *corect* dan tabah selama perundingan politik dalam menghadapi tekanan Belanda itu. Masyarakat juga sudah mendengar riwayat hidup G.R.M. Dorodjatun yang berpandangan cukup maju dan modern, karena sudah sembilan tahun menekuni ilmu di negeri Belanda sendiri.¹⁹

Dua bulan sesudah hari penobatannya, Sri Sultan dihadapkan pada peristiwa sejarah baru, yakni pendudukan Jerman atas Belanda pada tanggal 10 Mei 1940. Kondisi ini disusul dengan serangan Jepang terhadap Amerika Serikat melalui pemboman Pearl Harbour, pangkalan Angkatan Laut AS yang terbesar di Pasifik. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Tanggal 1 Maret 1942 satuan tentara Jepang mulai mendarat di Jawa

¹⁹ Sutrisno Kutoyo, *op.cit.*, hlm. 96.

Barat dan Jawa Tengah, hingga akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942 berhasil memasuki Kota Yogyakarta.

Dengan menyerahnya pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang, maka praktis Yogyakarta juga berada dibawah kekuasaan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, Kasultanan dan Paku Alam mendapat perlakuan istimewa. Sri Sultan dan Sri Paku Alam ditetapkan menjadi *Ko* (Raja), masing-masing memimpin pemerintahannya sendiri dengan segala hak istimewanya yang dimiliki sebelumnya.²⁰

Semenjak Jepang menguasai Yogyakarta, Sri Sultan memerintahkan Pepatih Dalem untuk berkantor di Keraton. Dengan demikian maka pihak penjajah Jepang jika ingin mengadakan hubungan dengan Sri Sultan tidak perlu melalui Pepatih Dalem. Hal ini dilakukan agar Jepang tidak bisa mengadu domba Sri Sultan dengan Pepatih Dalem.

Untuk lebih memperkecil peranan dan kekuasaan Pepatih Dalem, maka Sri Sultan membagi Pemerintah Kasultanan dalam jawatan-jawatan yang diberi nama *Paniradya*, yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala Jawatan yang diberi nama *Paniradyapati*. Dengan adanya jawatan-jawatan ini maka peranan Pepatih Dalem telah tergantikan oleh kepala Jawatan yang membidangi urusannya masing-masing. Sekilas akan nampak bahwa Sri Sultan memahami betul birokrasi pemerintahan tradisional dengan membentuk semacam Jawatan atau Departemen. Hal tersebut tentu saja hasil dari ketekunannya selama menempuh pendidikan di negeri Belanda.

²⁰ Soempono Djojowadono, *Kraton dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Lembaga Javanologi, (tt), hlm. 7.

Sri Sultan berhasil mematahkan politik penjajah yang mempergunakan Pepatih Dalem sebagai alat untuk mengabdi kepada kepentingan penjajah dan untuk diadu domba dengan Sri Sultan untuk kepentingan penjajah. Sri Sultan menghapus fungsi Pepatih Dalem dan beliau sendiri berkantor di Kepatihan untuk melakukan kekuasaan Pepatih Dalem dalam memerintah sendiri daerahnya yaitu Kasultanan Yogyakarta. Dengan demikian maka langkah politik dari Sri Sultan ternyata tepat sekali untuk dapat menghadapi saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kelak.²¹

²¹ Djoko Dwiyanto, *Kraton Yogyakarta Sejarah, Nasionalisme dan Teladan Perjuangan*. Yogyakarta : Paradigma Indonesia, 2009, hlm. 501.